

BAB IV

IMPLIKASI MODERNISME TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK UMMAT ISLAM DI INDONESIA PADA PARUH PERTAMA ABAD KE XX M.

Setiap kurun waktu dalam pergolakan sejarah umat manusia senantiasa ditandai dengan usaha untuk memahami dirinya dan masyarakatnya, para pemimpin tokoh politik selalu berusaha untuk menjernihkan keadaan-keadaan buruk yang menyertainya. Proses dialektisme kecenderungan politik keagamaan, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia dari zaman ke zaman telah melahirkan tokoh-tokoh politik yang mempengaruhi masyarakat sesuai dengan keadaan.

Sebagaimana di ketahui, bahwa pada tiap-tiap negara sudah barang tentu terjadi banyak macam pergolakan, baik pergolakan fisik maupun pergolakan politik, namun yang banyak terjadi adalah pergolakan politik.

Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia, penduduknya mayoritas masyarakat muslim, karena itu ia tidak bisa dipisahkan dengan partai politik. Disini Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah perjalanan politik, yang turut mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia dalam rangka membangun negara demokrasi, baik sebagai pembela tanah air, ideologi, maupun sebagai kekuatan sosial politik.

Oleh karena itu seiring dengan adanya usaha untuk modernisasikan gerakan akhirnya membawa lahirnya partai besar, yang muncul pada waktu yang bersamaan dengan gaya dan tujuan ideologi yang berbeda-beda.

A. Situasi sosial politik sekitar tahun 1901 - 1942

Memasuki awal abad ke-20, perjuangan umat Islam Indonesia dalam membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan, tidak lagi menempuh sistem perlawanan bersenjata seperti yang dilancarkan pada abad-abad sebelumnya. Agaknya berkembangnya kekuasaan penjajah Belanda menjadi pendorong kuat hingga tercipta keadaan demikian. Pergantian sistem perlawanan ini disesuaikan dengan tantangan yang dihadapinya. Sebagaimana keinginan pemerintah kolonial Belanda yang berusaha melancarkan gagasan Pax Nerlandica, yaitu suatu gagasan yang mencoba menjadikan Hindia Belanda (Indonesia) yang damai dibawah kekuasaan pemerintahannya.

Dalam menghadapi gagasan pemerintah kolonial Belanda ini, maka jalan yang ditempuh adalah membangkitkan kesadaran nasional dari seluruh bangsa Indonesia, yang dimulai dari kebangkitan kesadaran umat Islam Indonesia. Dalam kekuasaannya, pemerintah kolonial Belanda menerapkan beberapa politik terhadap Bangsa Indonesia. Diantaranya politik Devide Et Impera, politik pendidikan dan politik menjinakkan melalui usaha Asosiasi.¹ Apapun yang dijalankan Belanda bagi peningkatan taraf hidup penduduk Nusantara ini, tak lebih hanya sampai pada penemuan kepentingan penjajahnya.

¹Pencetus politik Asosiasi ini adalah Snouck Hurgronje. Asosiasi lebih bercorak kolonial mengandung maksud bagaimana mengikat daerah jajahan dengan negeri penjajah, sebab kesatuan hukum baru bisa diterima kalau melalui proses yang wajar. Sedangkan para pendukung Asosiasi menolak perubahan yang dipaksakan. Acib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, LP3S, 1985, hal, 39.

Gerakan Nasional yang menjadi mayoritas cita-cita terbesar rakyat Indonesia dan menjadi jiwa seluruh rakyat, ditujuan sebagai upaya realisasi lahirnya negara yang merupakan organisasi politik dan kebangsaan yang ideal bagi seluruh bangsa dan wilayah Hindia Belanda.

Respon ummat Islam yang demikian ini, karena menyadari bahaya Pax Nerlandica. Yang arti dan realitasnya jauh berbeda. Kata damai hanya sebagai penutup tindakan imperialismenya. Ummat Islam Indonesia merasakan diskriminasi dan penindasan, dari pemerintah kolonial Belanda, tidak sedikitpun memberikan kata damai yang terlihat dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia, terutama terhadap pribumi.

Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi ummat Islam Indonesia memilih jalan memodernisasikan gerakan perlawanannya. Perlawanan yang dipilihnya adalah membangkitkan kesadaran nasional dengan mendirikan organisasi massa dan politik. Perubahan sistem perlawanan yang demikian ini tidak hanya sekedar mengikuti gerak jaman, melainkan merupakan kelanjutan dari kekuatan sejarah yang hidup pada masa sebelumnya. Oleh karena itu dapatlah dimulai dan dikatakan bahwa Nasionalisme Indonesia dimulai dari Nasionalisme Islam.²

Islam di Indonesia ternyata merupakan kekuatan yang hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, Islam mempunyai arti tanah air dan bangsa. Demikian pula Islam identik dengan pribumi. Hal ini sebagai akibat dari politik penjajah Belanda yang menempatkan orang pribumi yang Kristen diperlakukan berbeda dengan pribumi yang memeluk Islam.

² Deliar Noer, Gerakan Modern, Op-Cit, hal. 8-1.

Mereka memperoleh hak yang dipersamakan dengan bangsa Eropa, oleh karena itu tidaklah mengherankan bila rakyat pribumi mempunyai pengertian Islam sebagai gerakan anti penjajah. Islam sebagai suatu istilah yang dipahaminya sebagai tanah air dan bangsa. Demikian sikapnya terhadap organisasi massa dan politik Islam diterimanya sebagai lambang kesatuan Nasional.

Dalam hubungannya dengan terwujudnya kesatuan nasional di Indonesia pada abad ke-20, tetap menempatkan Islam dalam kedudukan tersendiri. Dinyatakannya faktor terpenting yang mendorong terwujudnya itu adalah : pertama, Islam agama mayoritas bangsa Indonesia; kedua agama Islam menentang segala bentuk penjajahan Barat yang memaksakan agamanya dan ketiga, Ummat Islam berhasil menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Maka bermula dari organisasi ini terbukalah pandangan dan kesadaran Bangsa Indonesia akan arti penjajahan. Sehingga banyaklah bermunculan organisasi-organisasi politik maupun kemasyarakatan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat Islam telah menampakkan sikap anti penjajah. Hal ini banyak mendorong akan kesadaran politik bangsa Indonesia yang pada akhirnya mempersulit kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, sehingga pemerintah kolonial mengeluarkan kebijaksanaan politiknya terhadap organisasi-organisasi Islam yang banyak bermunculan pada waktu itu.

Tahun 1911 muncul Syarikat Islam karena kaum intelektual Indonesia merasa mereka membutuhkan badan yang lebih luas agar pandangan-pandangan nasionalis mempunyai wadah.

Dalam gerakan-gerakan politiknya, juga ekonomi, SI mencoba mendefinisikan diri sebagai suatu kelompok kelas sosial, terutama pada periode awal, SDI merumuskan diri sebagai kelompok pedang. Sejak itu, ideologi Islam mulai ditanamkan di dalam kesadaran umat yang pada periode ini masih dalam bentuknya yang sangat awal. Dengan tiga tujuan nasionalisme seperti melindungi kepentingan perekonomian rakyat (terutama kaum pedagang) Jawa dan Sumatra, melindungi iman Islam penduduk dari serangan para misionari Kristen dan memajukan kecerdasan bangsa Indonesia, maka Cokroaminoto, menjelaskan bahwa organisasinya itu tidak anti-Belanda dan akan menempuh jalur konstitusional dalam mencari pertolongan. Syarikat Islam kemudian menarik sejumlah besar pengikut dan hampir delapan puluh organisasi menggabungkan diri.³

Menyusul bangkitnya keinginan yang kuat pada kaum nasionalis yang ditimbulkan oleh Syarikat Islam pada tahun 1916, dampak peristiwa-peristiwa luar seperti pemberontakan di Cina, desakan rakyat Filipina yang menuntut pemerintahan sendiri dan kemenangan-kemenangan Angkatan Laut Jepang atas kerajaan Rusia (1905 - 1906) memegang peranan penting dan mengembangkan harapan kaum nasionalis. Secara serempak pelajar-pelajar Indonesia di Negeri Belanda mengorganisasikan diri guna membantu tercapainya kemerdekaan.

Dengan munculnya kelompok elit-terpelajar ini menjadikan Belanda bersifat paradoksal. Karena pendidikan yang mereka berikan mengandung benih-benih kontradiktif, yang secara

³ P.R.S. Mani, Jejak Revolusi 1945, Sebuah Kesaksian Sejarah, (terj), Lany Kristono, Pustaka Utama Grafiti Pers, Jakarta, 1989, hal, 31.

yang secara diametral bertentangan dengan tujuan semula. Kelompok inilah yang pada akhirnya menyuarakan semangat anti penjajahan dan menyerang kebijaksanaan kolonial Belanda. Namun demikian, pada waktu yang sama kelompok elit-terpelajar itu menjadi kekuatan tandingan bagi Islam.⁴

Melihat perkembangan SI yang semakin pesat dan juga pergerakannya yang semakin reaksioner dimana anggotanya banyak terdiri dari kaum intelek muda atau moderen, kaum ulama, pedagang, buruh, dan pegawai pemerintah golongan rendah, maka pemerintah kolonial mulai mencemaskannya. Reaksi dari kecemasan itu ditunjukkan dengan mencabut hak hukum beberapa cabang SI.

Sejalan dengan itu, Dengan suksesnya Revolusi di Rusia tahun 1917, di Indonesia muncul satu kekuatan politik baru. Kelompok ini, yang pada mulanya menamakan diri Persatuan Sosial Demokrasi Hindia (ISDV) mengubah diri menjadi Partai Komunis Indonesia tepatnya pada 23 Mei 1920.

Dalam kegiatannya (PKI) berusaha melakukan penyusupan ke dalam tubuh organisasi SI, karena Syarikat Islamlah yang dipandang populer dan paling banyak mendapatkan basis massa.⁵ Di bidang serikat buruh, orang-orang komunis bertindak sebagai pemimpin dalam mengorganisasikan beberapa pemogokan di Jawa, dan menarik sejumlah besar pengikut Syarikat Islam. Pada masa inilah dalam diri SI sudah timbul tanda-tanda bahwa ummat Islam digoyahkan posisinya.

⁴ Fachry Ali, Bahtiar Effendy, *Merambah*, Op-Cit, hal, 80.

⁵ H.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Moderen*, Op-Cit, hal, 261.

Kondisi yang demikian ini menuntut Cokroaminoto dan Salim berusaha keras untuk mempertahankan posisi sosial-politiknya, terutama sekali dalam menanggapi isu sosialis yang disuarakan pihak komunis. Di samping itu CSI juga melakukan pembersihan terhadap organisasinya dari unsur-unsur komunis. Yaitu dengan cara melaksanakan disiplin partai.

Tapi nampaknya SI tidak mampu lagi merebut posisi kepeloporannya, juga tidak setelah komunis menghilang secara formal dari panggung politik Indonesia akibat pemberontakan 1926/1927.⁶

Kevakuman politik intelektual yang ditinggalkan PKI sesudah tahun 1927, mendorong munculnya satu kekuatan politik baru. Dengan dipelopori oleh Ir. Soekarno dan kawan-kawannya, pada tanggal 4 Juli 1927 berdirilah Partai Nasional Indonesia (PNI). Dimana dalam kegerakkannya Soekarno menamakan ideologinya dengan "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme". Dan dari awalnya partai ini sudah mengambil sikap radikal non-kooperatif dengan pemerintah kolonial. Kelahiran partai baru ini bagi SI hanya semakin melemahkan posisi politiknya.

⁶Pemberontakan ini dilatarbelakangi dari dilaksanakannya disiplin partai didalam tubuh SI, sehingga cabang-cabang yang kena pengaruh PKI memisahkan diri dan memutuskan untuk mendirikan SI Merah (Sarekar Rakyat). Ketika PKI semakin kuat, maka SR meleburkan diri pada PKI. Sejak itu aksi-aksi teror dijalankan, sehingga mengakibatkan diambilnya tindakan-tindakan keras oleh pemerintah kolonial.

Karena konflik-konflik yang terjadi ditubuh SI, maka pada periode 1920 - 1942 masyarakat Indonesia mulai digolongkan menjadi ummat dan non ummat. Konsep mengenai ummat sebagai satu kekuatan sosial dan politik ini ditimbulkan karena konflik kelas antara kaum buruh dan non buruh. Selain itu juga disebabkan sehungan pada tahun 1917, ada koran Surakarta (Djawi His - woro) memuat tulisan menghina Nabi Muhammad. Dengan sendirinya orang-orang Islam merasa terhina dengan artikel tersebut. Itu sebabnya pada tahun 1918 diseluruh Indonesia didirikan "Tentara Kanjeng Nabi Muhamma", yang mempunyai tujuan untuk mencari persatuan lahir dan batin antara segenap kaum Muslimin, terutama sekali yang tinggal di Hindia Belanda dan untuk menjaga dan melindungi kehormatan agama Islam.⁷ Untuk menggenggerakkan orang-orang Islam di tanah air agar melahirkan perasaan marah mereka terhadap artikel itu, maka diselenggarakanlah rapat-rapat raksasa untuk menuntut penulis tersebut. Dari sebab itulah tumbuh perasaan ummat dan non ummat.⁸

Disamping tumbuhnya konsep ummat sebagai satu kekuatan sosial dan politik, pada periode ini pun ummat Islam banyak melakukan berbagai aksi dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi. Misalnya aksi koperasi untuk melawan dominasi penjajah dan Cina dengan menggalakkan usaha-usaha kolektif dalam berniaga di berbagai tempat. Selain itu, banyak juga berbagai gerakan protes dilancarkan.

⁷ Deliar Noer, Op-Cit, hal, 143.

⁸ Dr. Kuntowijoyo, Dinamika, Op-Cit, hal, 24.

Seperti perlawanan rakyat di Cimareme Garut, Jawa Barat, adalah satu bentuk pemberontakan yang bermula dari penolakan Haji Hasan untuk menjual padinya kepada Pemerintah Belanda. Haji Hasan yang memiliki 10 bahu sawah dengan hasil 250 pikul diwajibkan menjual 42 pikul padinya kepada pemerintah, dengan harga f.4,- per pikul. Haji Hasan merasa keberatan atas ketentuan tersebut, bukan tentang harga, tapi tentang ketentuan jumlah. Ia menghendaki dengan menjual 10 pikul.⁹ Agaknya pemerintah kolonial menganggap bahwa keengganan H. Hasan untuk mematuhi ketentuan penjualan padi tersebut - sebagai suatu pembangkangan, sehingga datanglah rombongan residen yang diperkuat dengan 27 orang polisi bersenjata, bertindak sangat keras dimana akhirnya Haji Hasan pun di bunuh. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Juli 1919.

Selain itu di Minangkabau juga dilancarkan gerakan protes, terutama terhadap campur tangan pemerintah dalam masalah masalah agama seperti memberlakukan Ordonansi Guru (peraturan guru).¹⁰ Yang isinya mengatur supaya setiap guru agama Islam yang akan mengajar di sesuatu sekolah, wajib memperoleh surat izin mengajar terlebih dahulu, harus diketahui bagaimana pela

⁹Ketentuan tentang wajib jual padi sebanyak 42 pikul ini oleh H. Hasan dirasakan sangat berat, karena tanggungan keluarganya cukup besar, ia harus menanggung 84 orang anggota keluarga. Sehingga pada tanggal 24 April 1919, H. Hasan mengajukan permohonan pertama kepada pemerintah, agar diperkenankan hanya menjual satu pikul per bahu, bukan empat pikul sebagaimana ditetapkan. Aqib Suminto, Op-Cit, hal, 70-71, Deliar Noer, Op-Cit, hal, 196. Sutrisno Kutoyo, Haji Hasan Arif, Jakarta, 1983 hal, 34-36

¹⁰H.C.Ricklefs, Op-Cit, hal, 270.

pelajaran yang diberikan kepada murid-murid, dan yang terakhir harus diketahui sampai dimana ketaatan murid kepada guru disalahgunakan oleh sang guru.¹¹ Praktek-praktek ordonansi yang demikian ini, mendorong Haji Rasul, sesepuh Thawalib untuk menentang pelaksanaan ordonansi tersebut. Karena hal ini dianggap salah satu usaha dari pemerintah untuk membelenggu Pendidikan Islam.

Dalam pelaksanaan ordonansi ini, Dr. de Vries dari Kantoer voor Inlandsche Zaken, ternyata memperoleh dukungan dari berbagai ulama tradisional, para penghulu, dan pejabat daerah dengan kepala nagari. Melihat kenyataan yang demikian, terbukti bahwa H. Abdullah Ahmad telah menerima ordonansi itu mendorong A.R. Sutan Mansur menyampaikan kekuatirannya kepada Haji Rasul. Menanggapi masalah ini maka pada tanggal 14 Juni 1928 Haji Rasul memimpin sebuah pertemuan di surau Syekh Jamil Jambek yang dihadiri sekitar 20 orang ulama muda, untuk membicarakan cara penolakan ordonansi yang sebaik-baiknya.¹²

¹¹Guru Ordonansi ini adalah pengembangan dari ordonansi tahun 1905 yang mewajibkan guru-guru agama Islam untuk minta izin, kemudian dinilai kurang efisien, karena laporan ten guru agama dan aktivitasnya yang secara periodik disampaikan bupati - ternyata kurang menyakinkan, di samping situasi politik waktu itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan "pemburuan" guru agama, maka pada tahun 1925 dikeluarkanlah ordonansi baru sebagai penyempurna. Dimana kewajiban memperoleh izin mengajar diganti dengan keharusan memberi tahu. Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk Jawa-Madura, tapi setelah dirubah, diberlakukan juga untuk daerah luar Jawa dan Madura. Sejak 1 Januari 1927 berlaku pula untuk daerah Aceh, Sumatra timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado dan Lombok. Sedang untuk daerah Sumatra Barat akan diterapkan mulai tahun 1928. Kemudian pada tahun 1930-an berlaku pula untuk Bengkulu. Adapun isi ordonansi itu antara lain menetapkan : (1) Setiap guru agama harus mampu

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1928 . . . di surau Syekh Jambek (di Bukittinggi) berhasil dilaksanakan pertemuan tertutup, juga hadir Dr. de Vries.¹² Menurut laporan resmi pemerintah Belanda, dalam pertemuan ini tampil sekitar 23 orang pembicara, terdiri dari 17 ulama kaum muda, 5 orang ulama kaum tua dan 1 orang pembicara netral. Agaknya pidato Haji Rasul sebagaimana diterangkan di bawah ini, berhasil menguasai sidang

"Sejak saya mendengar maksud pemerintah hendak menjalankan ordonansi ini di Minangkabau, bergoyang persendianku, lemah lunglai seluruh tulang belulangku. Saya insaf, sebetulnya maksud pemerintah tidaklah hendak menjalankan ordonansi yang sangat berat ini di negeri kita. Saya yakin pemerintah agung tidak bermaksud hendak menyinggung perasaan kita. Tetapi peraturan ini akan dijalankan adalah karena kesalahan kita selama ini. Kita ulama-ulama selalu berpecah-belah, selalu bersilang selisih. Inilah bahaya yang mengancam kita dan akan banyak lagi bahaya lagi, selama kita berpecah (mendengar pidato yang diucapkannya dengan penuh perasaan terharu dan dengan uraian air mata itu, semua

menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya; (2) tiap guru agama harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa diperiksa pejabat yang berwenang; (3) pengawasan dinilai perlu, untuk memelihara ketertiban dan keamanan; (4) bukti kelayakan bisa dicabut, bila guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud yang bisa dinilai sebagai mencari uang; (5) Guru agama bisa dihukum maksimum delapan hari kurungan atau denda f. 25,- bila mengajar tanpa surat tandaterima laporan, tidak benar keterangan atau pemberitahuannya dan lalai dalam mengisi daftar; (6) Guru agama bisa dihukum kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum f. 200,- bila masih mengajar setelah hak mengajarnya dicabut. Lihat Acib Suminto, Op-Cit, hal, 54, Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan..., Op-Cit, hal, 315.

¹²Deliar Noer dan Taufik Abdullah mencatat tanggal 19, tapi Hamka dan Suminto mencatat tanggal 18 Agustus; lihat Deliar Noer, Op-Cit, hal 178, Taufik Abdullah, Schools, hal, 114, Hamka, Ayahku, hal, 169, Acib Suminto, Op-Cit, hal, 56.

yang hadir bertangisan. Utusan pemerintah menyaksikan suasana ini). Beliau melanjutkan dengan kata-kata, sudikah tuan-tuan bersatu? Sudi! jawab hadirin gemuruh. Kemudian dipalingkannya wajahnya pada wakil pemerintah, Dr. de Vrites sambil berkata, sampaikanlah kepada pemerintah tinggi, janganlah dijalankan ordonansi itu di sini, kami tidak berpecah lagi. Kami telah bersatu.¹³

Sehingga dalam rapat umum yang kedua, 19 Agustus 1928, di gedung bioskop Bukittinggi yang dihadiri para ulama, guru-guru agama, ninik-mamak, wakil pemerintah, pers dan sekitar 5.000 orang pengunjung umum,¹⁴ sepakat untuk mengirim utusan ke Gubernur Jenderal, guna menolak dilaksanakannya Ordonansi Guru di Sumatra Barat dan menyatakan tekad mereka, "bahwa sebelum ada gangguan dan rintangan bagi mereka mengajarkan agama dan melaksanakan tugas keagamaan, lebih baik mereka mati lebih dahulu". Isi pernyataan yang disampaikan adalah :

- a. Telah seratus tahun: sejak orang-orang Islam Minangkabau kehilangan kemerdekaannya di negerinya sendiri dan pada tahun-tahun terakhir mereka pun dihadapkan pada aneka kekerasan yang sebagian besar berasal dari pemerintah.
- b. Sebagaimana yang mulia (Gubernur Jenderal) ketahui orang-orang Islam Minangkabau yang kuat memegang agama Islam rela mati demi memenuhi panggilan Allah.
- c. Islam adalah agama Allah, tiada satu pun manusia di dunia ini yang mengawasi dan mengontrolnya, kecuali Allah.

¹³ Aqib Suminto, Ibid, Lihat juga Deliar Noer, Ibid.

¹⁴ Burhanuddin Daya, Op-Cit, hal, 263.

- d. Orang Islam berada dalam perintah undang-undang Allah sebagaimana terdapat dalam AL-qur'an. Mereka wajib mempertahankan agama Allah dari setiap pengaruh dari luar, Mereka rela mengorbankan segala-galanya, kebahagiaan duniawi, kekayaannya bahkan kalau perlu jiwanya untuk mempertahankan agamanya.
- e. Mati dalam membela agama Islam adalah suatu kebahagiaan karena merupakan mati syahid di sisi Allah.
- f. Orang-orang Islam diwajibkan Allah mempertahankan agamanya dari rongrongan apapun.
- g. Kita sebagai ulama Islam di Minangkabau menyebarkan keberatan tentang adanya Guru Ordonansi jika dijalankan di Minangkabau.
- h. Bahwa pada tanggal 19 Agustus ulama-ulama Islam Minangkabau sudah membikin rapat terbuka membicarakan Guru Ordonansi. Dalam rapat itu sudah diambil putusan menyatakan tidak setuju, karena guru ordonansi itu sangat menggoncangkan umat Islam dan ulama-ulamanya di Minangkabau. Mereka suka mati lebih dahulu daripada melihat agama mereka itu terganggu jalannya.¹⁵

Demikian isi penolakannya terhadap Ordonansi Guru. Jadi tidak heran kalau gerakan mereka ini dianggap sebagai jihad di jalan Allah yang menghasilkan kegagalan pemerintah kolonial mencapai maksudnya. Dan peristiwa ini dianggap sebagai puncak gerakan politik keagamaan ulama kaum muda Sumatra Barat dibawah kepeloporan Sumatra Thawalib, setelah mereka gagal meneruskan gerakan politik panas komunis.¹⁶

¹⁵Acib Suminto, Op-Cit, hal, 57, Lihat juga, Burhanuddin Daya, Ibid

¹⁶Paham dan gerakan komunis internasional sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1913-an. Mulai tahun 1920 paham dan gerakan ini dipropagandakan pula ke Sumatra Barat. Usaha komunis memasuki Thawalib dan merebut simpatiknya merupakan usaha yang sangat strategis, karena Thawalib merupakan kubu gerakan kaum

Dari beberapa gambaran situasi politik yang penulis ungkapkan tadi, masih ada yang lebih penting dari periode ini yaitu banyaknya didirikan berbagai asosiasi oleh ummat Islam, seperti terbentuknya kerjasama antara SI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi lain baik di Jawa Barat, Jakarta, Sumatra, serta diberbagai tempat lainnya. Adapun yang mendorong terbentuknya kerjasama ini, ~~adalah~~ diawali dari kelemahanya SI, karena rakyat pedesaan merasa takut dan menganggap bahwa kartu keanggotaan SI hanya akan membawa kesulitan. Hal inilah yang membuat PSI pada tahun 1924, menjalankan kebijakan Politik Hijrah, tidak lagi mau kooperasi dengan pemerintah Belanda, tidak mengirinkan wakil-wakilnya lagi dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga dalam tahun 1930-an ia benar-benar tidak turut serta dalam pergerakan Nasional.¹⁷ Selain itu penahanan terhadap Cokroaminoto (1921 - 1922), dan harapan partai kepada pihak pemerintah untuk membersihkan nama presidennya dari segala tuduhan tentang keterlibatannya

kaum muda yang paling berpengaruh waktu itu. Berkat pengaruh Datuk Batuah, Sumatra Thawalib Padang Panjang akhirnya dapat disetir ke arah komunisme. Dalam melancarkan propagandanya Datuk Batuah bersama Jalaluddin Tamim menerbitkan surat kabar "Pemandangan Islam" yang isinya banyak menguraikan teori komunis dan menghubungkannya dengan ajaran Islam. Dalam ajarannya dinamakan "Ilmu Kuminih". Dengan memperalat al-qur'an dan adat komunis berusaha menakutkan orang, bahwa komunisme dan agama, komunisme dan adat, adalah satu dan sama. Kemudian Mereka singgung ajaran Islam, bahwa "di sisi Allah manusia itu sama dan semua orang harus tunduk di bawah otoritas al-qur'an", kemudian ini mereka hubungkan dengan ide tentang "sama rata sama rasa". Namun usaha untuk menyebarkan pemikiran komunis ini akhirnya berhasil dibendung oleh Haji Rasul bersama kawan-kawannya. Baca, Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan..., Ibid, hal, 243-251.

¹⁷ Deliar Noer, Op-Cit, hal, 149.

dalam gerakan afdeling B ¹⁸ menyebabkan partai tidak lagi percaya pada pihak pemerintah.

Al-Islam Kongres yang diadakan pada tahun 1924 di Surabaya, membenarkan sikap PSI dan memutuskan untuk mengirimkan perutusan ke 'Pan Islamical Conference' di Kairo, sehubungan ~~atas~~ ~~pendirian~~ Komite Khalifah itu.¹⁹ Dalam Al-Islam Kongres gabungan yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tahun 1925, dengan keputusan pada tahun 1926, berhasil memilih 2 orang utusan yaitu Umar Said Cokroaminoto (Central Syarikat Islam) dan K.H. Mas. Mansur (Muhammadiyah) untuk menghadiri Muktamar Alam Islam di Makkah. Kemudian dalam kongresnya yang keenam di Surabaya, pada bulan September 1926 diputuskan untuk menggantikan nama Komite Khalifah itu dengan nama "Muktamar Alam Islam Hindi Syarqiyah" (MAIHS), sebagai cabang dari pada Muktamar Alam Islam yang berpusat di Makkah.

¹⁸Gerakan Afdeling B, (seksi B) atau Syarikat Islam B, di dirikan oleh Sasrokardono dari CSI pada tahun 1917, dinamakan demikian karena gerakan ini dianggap sebagai cabang dari gerakan revolusioner rahasia atau semacam perkumpulan rahasia yang mana arti sepenuhnya dari kelompok tersebut belum jelas. Tapi yang jelas adanya komplotan rahasia yang memiliki kartu A dan B, oleh Belanda dinggap sebagai penyamaran untuk membe-
rontak kepada pemerintah. H.C. Ricklefs, Op-Cit, hal,263, Acib Suminto, Op-Cit, hal,75.

¹⁹Setelah berhasil menaklukkan Makkah pada tahun 1924, dan berhasil menguasai seluruh Najed dan Hijaz dari kekuasaan Syarif Husin, Ibnu Sa'ud mengadakan pembaruan sesuai dengan ajaran Wahhaby, ia pun berambisi untuk menjadi Khalifah. Untuk menunjang ini ia bermaksud mengundang seluruh negara dan ummat Islam untuk menghadiri Kongres Khalifah tersebut yang akan diadakan di Makkah pada musim haji 1926. Acib Suminto, Ibid, hal, 88, Djárnawi Hadikusuma, Dari Jamaluddin...., Op-Cit, hal,77, H.C. Ricklefs, Ibid, hal, 269.

Perjalana kongres tidaklah semulus sebagaimana yang diinginkan, sebab dari beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam banyak kali kongresnya, terutama sehubungan dengan perbincangan masalah pengiriman utusan ke kongres khilafiyah di Makkah, tampak sekali di dominasi oleh golongan Modernis, mem bawa implikasi pada terbentuknya Komite Merembuk Hejaz, yang sejak 31 Januari 1926 menjelma menjadi Nahdlatul Ulama.²⁰

Disamping itu juga membawa akibat sampingan terhadap perpecahan antara Muhammadiyah dengan Partai Syarikat Islam.²¹

Terhadap kepemimpinan SI sendiri, kepercayaan yang selama itu diberikan kepadanya, secara berangsur-angsur berkurang, bukan saja disebabkan perselisihan tentang soal-soal 'furu' dan khilafiah, melainkan juga di karenakan persoalan pribadi dan sebagian lain oleh alasan-alasan yang telah disebutkan kalangan pembaharu.

Merasa semakin banyak hambatan yang dihadapi kongres al-Islam, pada tahun 1927 Syarikat Islam berusaha mendirikan suatu bentuk baru dalam mencari issu pemersatu antara kelompok kelompok Islam yang mereka sebut "Majelis Ulama", namun usaha ini tidak memperoleh hasil dan tinggal sebagai alat dari partai itu saja.

²⁰ Deliar Noer, Gerakan Modernis..., Op-Cit, hal, 223.

²¹ Tahun 1926-1927 timbul ketegangan antara Muhammadiyah dan PSII. Ketegangan ini ditimbulkan oleh asung dan fitnah pihak ketiga, dimulai sejak sepulangnya Cokroaminoto dan K.H Mas. Mansur dari Makkah. Beberapa tokoh Muhammadiyah antara lain H. Sujak yang pada tahun itu pergi haji, sempat menyebarkan pelbagai berita kekurangan pemimpin SI. Di lain pihak PSII Randublatung juga menyebarkan surat siaran tertanggal 13 Agustus 1926, dimana dinyatakan bahwa Muhammadiyah pernah minta bantuan uang pada pabrik gula di Yogya untuk ongkos pengiriman mu-baligh.....Djarnawi Hadi Kusuma, Op-Cit, hal, 84.

Sehingga dalam tahun 1927 hingga 1930 tidak ada usaha untuk mengadakan kongres Islam, rupanya masing-masing organisasi Islam sedang sibuk menyelesaikan persoalan interennya.

Perkembangan Partai Syarikat Islam selanjutnya, dengan masuknya pengaruh golongan yang kembali dari negeri Belanda seperti Dr. Soekiman, yang menghendaki agar ditegaskan ide persatuan Indonesia di dalam nama PSI, maka nama itu ditambahkan dengan perkataan Indonesia, sehingga menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) tepatnya bulan Januari 1929. Setelah itu diusahakan mencari perbaikan dengan jalan mengadakan kongres-kongres se-Propinsi.

Tahun 1932 merupakan tahun musibah kedua, dimana di dalam PSII terjadi suatu pertentangan antara dua aliran yaitu Cokroaminoto - Salim yang lebih menekankan pada azas agama sedangkan kelompok Sukiman - Suryopranoto menekankan lebih tegas kepada azas kebangsaan. Pertentangan ini semakin hebat sehingga menimbulkan perpecahan, dengan dipecatnya kelompok Sukiman dari PSII maka ia mendirikan partai sendiri dengan nama Partai Islam Indonesia (PARII) yang berkedudukan di Yogyakarta. Dan partai itu dinyatakan berhaluan kooperasi.²² Sehubungan dengan situasi politik reaksioner pemerintah dan sikap pergerakan yang kooperatif, akhirnya menimbulkan adanya golongan yang pro dan kontra terhadap sikap tersebut. Sehingga lahirlah suatu barisan penyeder PSII.²³

39. ²²Susanto Tirtoprodjo, Sejarah Pergerakan..., Op-Cit, hal.

²³Organisasi ini dipimpin oleh Agus Salim dan Sangaji dengan tujuan hendak mengusahakan agar PSII bersifat kooperasi.

Selanjutnya mereka yang mendirikan barisan tersebut dikeluarkan dari PSII pada tahun 1937, yang kemudian mereka mendirikan partai baru dengan nama PSII Penyebar.

Usaha untuk mempersatukan kembali dua aliran yang bertentangan antara PSII dan PARII, yang ternyata hanya menimbulkan kelemahan gerakan Islam, maka pada bulan Juli 1937 dapat dicapai pencabutan kembali pemecatan terhadap Sukiman dan kawan-kawannya. Akan tetapi dalam hidup kepartaiannya ternyata kelompok Sukiman tidak mendapatkan tempat dalam partai tersebut, sehingga mereka keluar lagi dari PSII dan kembali mendirikan Partai Islam Indonesia tepatnya pada bulan Desember 1938, Dengan kedudukan di Solo.²⁴

Selanjutnya, sehubungan dengan partisipasi PSII dalam gabungan politik Indonesia (GAPI), terdapat sekelompok pemimpin organisasi diantaranya Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Dimana ia tidak menyetujui keikutsertaan tersebut, sehingga menimbulkan perpecahan dan berakibat mereka dikeluarkan dari PSII.

Akhirnya sampai dengan persiapan masuknya Jepang ke Indonesia, organisasi politik umat Islam Indonesia telah mengalami beberapa kali perpecahan yang menjadikan lemahnya aktifitas mereka di dalam pergerakan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka. Salah satu sebab yang menimbulkan kelemahan gerakan Islam pada periode ini karena lahirnya faksi-faksi (golongan - golongan), misalnya dalam sebutan "ko" dan "non-

²⁴A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan..., Op-Cit, hal,147.

dan "non-ko" di bidang politik, sedangkan dalam pandangan keagamaan sering disebut "modern" dan "kolot".

Merosotnya pengaruh Syarikat Islam yang sebagian besar akibat timbulnya perpecahan diantara para pemimpin SI, sementara itu pertentangan dalam ummat Islam masih terus berlangsung,²⁵ di pihak lain penekanan-penekanan yang tertuju pada ummat Islam pun tak kunjung reda, dalam keadaan seperti ini, kesadaran kemudian timbul dari beberapa tokoh Islam, mengajak kembali pada persatuan yang selama ini terabaikan. Salah satu diantara mereka adalah K.H. Hasyim Asy'ari. Kesadaran untuk menggalang persatuan dalam persaudaraan Islam yang dicetuskannya dalam kesempatan kongres Nahdlatul Ulama (1936) di Banjarmasin, mendapatkan sambutan yang positif. Sehingga sejak itu segala persoalan yang berhubungan dengan pertentangan faham, selalu dibicarakan untuk mendapatkan permufakatan.

Terbinanya persatuan ummat Islam ini, terlihat dalam kerjasama antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam sponsori untuk menciptakan suatu federasi Islam yang baru dan diberi nama "Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) atau Majelis Agung Islam Indonesia.

Majelis ini didirikan berdasarkan hasil keputusan pertemuan yang diadakan di Surabaya pada tanggal 18 - 21 Septem-

²⁵ Yang menjadi sebab pertentangan diantara mereka terletak di bidang khilafiyah, cabang-cabang dari ajaran (masalah Furu') yang terletak dalam fiqh.

September 1937, atas inisiatif K.H.A. Wahab Hasbullah dari N.U, K.H.A. Mas. Mansur dari Muhammadiyah, Wondoamiseno dari PSII, dan K.H.A. Dahlan. Dengan terbentuknya sekretariat ini, maka MIAI secara resmi berdiri pada tanggal 21 September 1937. Berdirinya federasi ini merupakan cermin persatuan dan dakwah bersama antara ulama tradisional (seperti Syaikh Sulaiman ar-Rasuli) dan ulama modernis (seperti Abdul Karim Amrullah). Yang kemudian segera diikuti oleh kebanyakan organisasi-organisasi Islam. Seperti Lajnah Tanfidziah PSII, Pengurus Besar Muhammadiyah, Pengurus Besar Al-Islam, Pengurus Besar PUI, Al-Irsyad cabang Surabaya, Al-Hidayatul Islamiyah Banyuwangi dan Al-Khairiyah Surabaya.²⁶

Pada tahun 1938, MIAI mulai berkembang dan memperoleh bentuknya yang kongkrit. Pada bulan Mei 1939, sehubungan dengan terbentuknya federasi baru GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang sebagian besar diikuti oleh partai nasionalis, mendorong MIAI untuk bergabung didalamnya. Bersama-sama dengan federasi politik GAPI, federasi Islam MIAI dan PVPN, perserikatan para pegawai pemerintah, bersatu untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadap status quo kolonial.²⁷

²⁶Deliar Noer, *Gerakan Modernis...*, Op-Cit, hal, 54, Djarnawi Hadikusuma, *Dari Djarnaluddin.....*, Op-Cit, hal, 87.

²⁷Diantara wakil-wakil yang menyuarakan aspirasinya dalam Komite Majelis Rakyat (perubahan dari Kongres Rakyat Indonesia) antara lain GAPI diwakili: Abikusno Tjokrosujoso (PSII), Sukardjo Wirjopranoto (Parindra), Oto Iskandar Dinata (Pasundan), Sartono (Gerindo), dan Kasimo (PPKI). Yang mewakili MIAI: Wachid Hasyim (NU), Wondoamiseno (PSII)

Yang menuntut Indonesia ber-parlemen, dipakainya bahasa nasional, dan lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan.

Persatuan mereka dalam menuntut konsesi-konsesi itu dapat kita lihat dari dua petisi yang diajukan Volksraad pada Pemerintah. Pertama tahun 1936, Sutardjo Kartohadikusumo yang mewakili generasi muda para pegawai priyayi, mengajukan petisi kepada pemerintah Belanda agar memberikan otonomi kepada Indonesia di dalam Kerajaan Belanda. Kedua pada bulan Pebruari 1940, Wihoho, yang mewakili partai Islam yang baru di dalam Volksraad, juga memberikan desakan bagi konsesi-konsesi yang serupa.²⁸ Akan tetapi kedua petisi yang pada mulanya diterima ditolak oleh Parlemen Kerajaan Belanda, dengan alasan bahwa Indonesia belum mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Ketika bahaya invasi Jepang kelihatan semakin jelas dan tak diragukan lagi maka pemerintah kolonial mencari pendekatan terhadap perwakilan-perwakilan kaum elite Indonesia yang tergabung di dalam Majelis Rakyat Indonesia, dengan memberikan janji-janji akan mengundang konferensi kerajaan, guna mendiskusikan pembaharuan-pembaharuan konstitusional. Pada bulan Nopember tahun 1940, sekolah latihan khusus bagi peng-hulu secara resmi dan penuh kemegahan dibuka di Cirebon.

Dr. Sukiman (PII), K.H. Mas. Mansur dan Umar Hubesy (Muhammadiyah), Yang mewakili PVPN: Soeroso, Atik Soeari, Mr. Hindro Martono, Rooslan, Wongsokusumo, dan Drijowongso. Harry J. Banda, Bulan Sabit..., Op-Cit, hal, 269.

²⁸ Ibid, hal, 128. Baca juga, P.R.S. Mani, Jejak Revolusi..., Op-Cit, hal, 43, Aqib Suminto, Op-Cit, hal, 146-147.

Jawa Barat, Dan beberapa bulan menjelang pecahnya perang Pasifik, pemerintah kolonial mengambil langkah akan mengumumkan dikeluarkannya perangko khusus sebesar lima rupiah sebagai biaya tambahan bagi kepentingan Muhammadiyah, dan pemerintah akan berusaha mencabut kembali ordonansi guru tahun 1925 yang dianggap sebagai sumber perpecahan.

Namun, betapa pentingnya dan betapa pun menyenangkan konsesi-konsesi itu, adalah meragukan. Bahkan janji-janji akan diadakannya kongres setelah perang usai tidaklah pernah terlaksana,²⁹ gagalnya konferensi ini, membuat bubarnya kesatuan yang baru saja diperoleh dari ketiga kelompok elite Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dari keluarnya PSII dari GAPI.

Rasa tidak puas yang berkelanjutan ini mengakibatkan kepeloporan Islam dalam upaya mengusir penjajah Belanda terhenti. Sebagai gantinya, berbagai kegiatan nasional diambil alih oleh kelompok terpelajar sekuler, terutama pada akhir pemerintahan Belanda dan Jepang.

²⁹Sesudah Netherland diserbu tentara Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler pada tanggal 10 Mei 1940, maka Ratu Wilhemina dengan segenap aparatnya mengungsi ke Inggris. Namun demikian pemerintah Belanda yang berkedudukan di London masih sempat berhubungan dengan pemerintah jajahan Hindia Belanda di Indonesia. Dalam kesempatan ini para pemimpin kita menuntut kepada pemerintah jajahan Belanda di Indonesia, agar Indonesia dibebaskan dari belenggu penjajahan untuk merdeka seratus persen. Sehubungan dengan itu diambillah suatu siasat pemerintah jajahan untuk mengambil hati rakyat Indonesia dengan membentuk suatu komisi untuk perubahan ketatanegaraan, yang diketuai oleh seorang Belanda bernama Visman, yang kemudian dikenal dengan Komisi Visman. Kenyataan menunjukkan bahwa komisi Visman dilarang untuk menyinggung-nyinggung persoalan Indonesia Merdeka sepenuhnya, hanya dijanjikan kepada Bangsa Indonesia : apabila Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan ada di pihak Belanda dan sekutunya. Hindia Belanda akan diberi hak berdiri

Di pihak lain sikap frustrasi di kalangan nasionalis, justru semakin meningkatkan perasaan anti-Belandanya. Perasaan-perasaan itu dengan jelas dilukiskan oleh Sutan Syahrir, salah seorang diantara pemimpin nasionalis yang paling berorientasi ke Barat, yang kemudian menempuh politik lunak terhadap Belanda ketika ia menjadi perdana menteri Republik Indonesia. Tulis Syahrir :

"Kesadaran akan adanya dominasi asing yang bergandengan dengan hasrat yang besar akan kebebasan dan kemerdekaan menjadi bertambah kuat. Ketika perang berkembang dalam tahun-tahun pertama itu rakyat merasa puas oleh kemalangan yang di derita oleh penguasanya. Hal itu menambah dorongan kepada perpisahan yang lebih jauh dari pihak Belanda dan bagi pertumbuhan kesadaran nasional. Bagi rata-rata orang Indonesia perang sesungguhnya bukanlah suatu konflik antara dua kekuatan dunia yang besar. Bagi mereka, perang itu adalah suatu perjuangan dimana penguasa kolonial Belanda akhirnya akan dihukum oleh Yang Mahakuasa untuk kejahatannya, kesombongannya dan penindasannya terhadap Indonesia. Diantara rakyat banyak perasaan anti Belanda makin lama makin kuat. Dan selanjutnya :
 "...perasaan anti Belanda meluas bahkan di antara penduduk Kristen daerah Maluku. Dan akhirnya :...mayoritas rakyat bergembira karena kemenangan-kemenangan Jepang. Makin dekat tentara Jepang ke Jawa, semakin terbuka rakyat memperlihatkan keinginannya akan kedatangan para pembebas".³⁰

sejajar dengan Kerajaan Belanda di Nederland asalkan di dalam ikatan dengan negeri Belanda. Janji-janji itu diucapkan oleh Ratu Wilhemina pada tanggal 6 Desember 1941 terkenal dengan Janji Desember. Demikian janji Pemerintah Belanda yang hanya merupakan fatamorgana "Indonesia akan Merdeka kelak kemudian hari". Janji yang hampa sampai dengan gulung tikarnya kekuasaan Belanda di Indonesia tanggal 10 Maret 1942. Djauharuddin Peranan Ummat Islam Dalam Proses Pembentukan dan Pembangunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Angkasa, Bandung, 1985, hal, 28.

³⁰ Mengutip, Nugroho Notosusanto, Tentara Peta pada jaman Pendudukan Jepang di Indonesia, Pen. Gramedia, Jakarta, 1979, hal, 17.

B. Peran dan Aktifitas Beberapa Organisasi Islam di Indonesia dalam Perjuangan Kemerdekaan

Untuk memahami peran dan aktifitas umat Islam di dalam memberi motivasi dan menggerakkan masyarakat untuk menentang penjajah Belanda, maka ada beberapa segi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa-Indonesia di mana ulama ikut ambil bagian di dalamnya; seperti:

- a. Haji Samanhudi; pada tahun 1911, menggerakkan rakyat menentang Belanda dengan menggunakan alat organisasinya Syarikat Dagang Islam. Di mana bentuk pertentangan tersebut adalah menentang kekuasaan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda, karena para pedagang pribumi pada saat itu, merasa tertindas oleh pedagang asing (Belanda dan Cina).
- b. Syarikat Islam; merupakan perubahan dari perkumpulan SDI, organisasi ini dibentuk pada tahun 1912. Cokroaminoto menggerakkan rakyat untuk menentang penjajah Belanda, dengan mempergunakan alat organisasi seperti menghidupkan jiwa dagang bagi pribumi untuk melawan kekuasaan monopoli yang dilakukan oleh pedagang asing Belanda dan Cina dengan mendirikan koperasi dan toko-toko koperasi di Surabaya. Dan atas prakarsanya pada tahun 1921 SI tidak lagi merupakan gerakan agama saja akan tetapi bertindak sebagai partai politik dengan mengganti nama Partai Syarikat Islam dan menegaskan tujuannya memperoleh kemerdekaan nasional serta men-

- jadi anggauta PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Dan tahun 1929 namanya resmi diganti "Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
- c. Pada tahun 1912, Kyai Haji Ahmad Dahlan, menggerakkan rakyat untuk menentang penjajah Belanda dengan menggunakan alat pendidikan. Gerakan rakyat itu dihimpun dalam organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Tindakan Kyai Ahmad Dahlan dalam menentang penjajah adalah sebagai berikut :
1. Mengadakan pemurnian pengamalan ajaran Islam, untuk membendung budaya Belanda yang mempengaruhi masyarakat seperti minum-minuman keras, berpesta- pesta mewah yang menimbulkan kebobrokan moral bangsa.
 2. Mendirikan sekolah-sekolah sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah terjajah, mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk mengimbangi sekolah rakyat di desa-desa yang didirikan oleh pemerintah Belanda.
- d. Pada tahun 1914, lahir suatu perhimpunan Al-Irsyad di Jakarta, dengan pimpinan Ahmad Syurkati. Berdirinya perkumpulan itu dimaksudkan untuk memajukan pelajaran agama yang murni dalam kalangan bangsa Arab di Indonesia.
- e. Tahun 1933, muncul organisasi Persis (Persatuan Islam) di bawah pimpinan A. Hasan di Bandung. Dalam menggerakkan untuk menentang penjajah, Al-Irsyad dan Persis

tidak jauh berbeda dengan ajaran Muhammadiyah.

f. Pada tahun 1926, Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Abdul Wahab, mendirikan organisasi perserikatan Nahdlatul Ulama. Beberapa tindakannya dalam melawan kebijaksanaan pemerintah Belanda, seperti :

1. Menuntut kepada pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen.
2. Menuntut kepada pemerintah Belanda agar "Guru Ordo nansi" di cabut, karena tidak sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia. Mereka menginginkan kebebasan dan kemajuan zaman.
3. Menuntut kepada pemerintah Belanda, agar pajak yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan agama dihapuskan.³¹

g. Pada tahun 1928, dengan di pelopori oleh beberapa ulama di Minangkabau seperti, Syekh Suleman Rasuly, Syekh Muhammad Djamil Djaho, Syekh Abbas Ladang Laweh Syekh Abdul Wahid es Salihy dan Syekh Arifin Arsjady, menggerakkan rakyat untuk menentang penjajah Belanda, dengan mempergunakan alat pendidikan. Gerakan rakyat itu dihimpun dalam organisasi "Madrasah Tarbiyah Islamiyah". Pada awal berdirinya organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan Islam yang bermazhab Syafi'i.

³¹ Imam Munawir, Kebangkitan Islam....., Op-Cit, hal, 305.

Dalam ~~dua tahun~~ ^{dua tahun} ~~kemudian~~ ^{kemudian} Madrasah Tarbiyah Islamiyah telah mengembangkan dirinya menjadi Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), tepatnya pada tanggal 20 Mei 1930 dengan kedudukan di Bukit Tinggi Sumatra Barat.

Dalam mengembangkan usahanya Partai ini berazaskan Islam, paham dalam syariat dan ibadah menurut mazhab Syafi'i dan dalam lapangan agidah menurut mazhab Ahlussunnah Waljama'ah dengan tujuan Kalimatullah hiyal ulya (ketinggian agama Islam) dalam arti luas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perti :

1. Memperdalam rasa cinta terhadap agama, bangsa dan tanah air.
2. Memperhebat penyiaran dan pertahanan agama Islam.
3. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negarnegara Indonesia .
4. Memajukan pengajaran, pendidikan dan kecerdasan rakyat.
5. Memajukan perekonomian dan mengusahakan kemakmuran rakyat.
6. Dan lain-lain.³²

h. PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), merupakan organisasi sosial yang berkembang dari Sumatra Thawalib, Pergerakan Islam moderen di Minangkabau ini didiri -

³²Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang-surut, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hal, 75.

rikan di Bukittinggi dalam suatu kongresnya pada tanggal 22 - 27 Mei 1930. Sejak itu Permi menjadi satu organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Islam dan kebangsaan, kemudian menjelma menjadi partai politik Islam yang radikal dan non-kooperasi dengan cita-cita Islam mulia dan Indonesia merdeka. Dengan pimpinan utamanya, Haji Mukhtar Lutfi menggerakkan Permi menjadi partai rakyat, mempersatukan semua golongan muslim tanpa membedakan derajat dan tingkatan. Ia juga membuka pintu bagi putra-putri Indonesia untuk berjuang mencapai kemuliaan dan kemerdekaan, mengatur, memajukan dan menyusun organisasi perusahaan yang baik dan sempurna guna memperoleh kesempurnaan hidup beragama dan berbangsa bagi setiap anggotanya. Untuk itu Permi mencurahkan perhatiannya pada faktor ekonomi dengan cara memajukan dengan sistem koperasi. Dan satu lagi bentuk perjuangan Permi yaitu menentang Ordonansi Sekolah Liar.³³

- i. MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) didirikan atas prakarsa K.H.A. Dahlan dan K.H. Mas Mansur pada bulan September tahun 1937. Majlis ini merupakan federasi beberapa perkumpulan Islam. Duduk dalam kepengurusan, K.H. Abdul Wahid Hasyim, Dr. Sukiman Wondoamiseno,

³³Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan...., Op-Cit, hal, 270-298.

K.H. Mas Mansur, K.H. Mahfudh Sidik, Umar Hubais dan lain-lainnya:

Pada mulanya organisasi ini tidak berpolitik, namun dalam perkembangan selanjutnya. MIAI mengikuti kegiatan dalam politik menentang penjajah bersama-sama dengan GAPI dan Majelis Rakyat Indonesia.

Demikian sedikit peran dan aktifitas yang dimainkan oleh sekelompok orang-orang Islam. Sekali - pun sifatnya berlainan namun semua organisasi itu bergerak untuk menjalankan perintah agama, khususnya dalam memberikan motifasi dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Dimana muncul dan bangkitnya gerakan-gerakan organisasi tersebut tak lain reaksi rakyat melawan ancaman kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda. Di samping itu juga didukung dengan landasan ukhuwah dan solidaritas. Sebab dengan ukhuwah dan solidaritas ini usaha pecah belah yang senantiasa dilancarkan oleh pemerintah kolonial akan dapat ditanggulangi dan diatasi.